

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Prinsip-prinsip ekosentrisme dalam ekologi menekankan bahwa manusia tidak bisa dianggap sebagai pusat penciptaan, tetapi merupakan bagian dari komunitas bumi yang mencakup manusia dan non-manusia. Sistem hukum yang mencerminkan perubahan persepsi ini akan memajukan konsep bahwa manusia dan alam dapat relevan dalam sistem hukum. Dalam penelitian ini, dapat dilihat bagaimana sejarah dan cara China melakukan upaya implementasi *ecological civilization* melalui *unified supervision and management system* yang terdiri atas *Natural Resources Asset*, *Supervision Accountability System*, dan *Accountability Audit & Evaluation*. Sistem tersebut meliputi *natural resources asset* yang digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah dan penggunaan aset sumber daya alam dan *supervision accountability system* yang merupakan dokumen legal sebagai regulasi penggunaan sumber daya alam. Untuk mengetahui apakah suatu provinsi maupun negara China mencapai *ecological civilization*, perlu untuk melakukan audit dan dianalisis penggunaannya berdasarkan Ecological Civilization Index (ECI) yang berisi sub sistem ekonomi, energi, dan lingkungan. Akan tetapi, sebagai negara sosialis di mana segala kebijakan diatur oleh pemerintah, China mengalami banyak kritik mengenai potensi terjadinya *state propaganda* dan *greenwashing*. Terdapat dua asumsi atas pernyataan tersebut, yaitu keterbatasan data provinsi China dan ketidakcocokan dengan data PBB mengenai implementasi *ecological civilization*. Yang kedua, *green development* yang sedang dibangun oleh China terjadi akibat motif yang disebut *greenwashing*. Asumsi ini dapat dijadikan unsur *gap research* untuk penelitian selanjutnya.

Dilihat dari perspektif ekosentrisme, demi kepentingan terbaik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, mempertimbangkan lingkungan saja

tidak cukup, tetapi juga harus melakukan evaluasi mengenai pemanfaatan sumber daya alamnya—hal ini diterapkan dalam *nautral balance sheet* yang mengawasi pemanfaatan sumber daya alam; *supervision accountability system* yang melegalisasi secara standar atau aturan termasuk kawasan *eco-redlines* yang dilindungi; serta *audit and evaluation* yang menjadi langkah terakhir untuk mengukur sukses indikator *ecological civilization*.

4.2 Saran

Ketidaklengkapan data sentralisasi mengenai performa *unified supervision and management system* di seluruh provinsi China membuat penilaian terhadap efektivitas sistem dan pencapaian *ecological civilization* menjadi terhambat. Hal ini dapat berdampak negatif pada peran pemerintah dan masyarakat China dalam mencapai *ecological civilization* karena tidak adanya integrasi data dan akses yang terbuka. Penulis menyarankan bahwa pemerintah China dapat mengintegrasikan data sistem untuk seluruh provinsi China dan memperjelas ukuran sukses implementasi *ecological civilization* di China.